

PENGARUH TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Siska Rahayu¹, Nasrul Kahfi Lubis², Agustina Nurul Fajriah³

siskarahayu541@gmail.com¹, nasrulkahfi@unsam.ac.id², agustina@unsam.ac.id³

Universitas Samudra

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan apakah transparansi dalam pengelolaan dana Desa dan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 masyarakat Kecamatan Tenggulun. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada 100 responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Science). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dan dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas Public, Kesejahteraan.

ABSTRACT

This study aims to determine whether transparency in village fund management and public accountability influence community welfare in Tenggulun District, Aceh Tamiang Regency. The sample in this study consisted of 100 residents of Tenggulun District. Data collection was conducted by distributing questionnaires to 100 respondents. The data obtained were then analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Science). The research method used was quantitative research and analyzed using a multiple linear regression model. The results of this study indicate that transparency in village fund management has a positive and significant effect on community welfare. Public accountability has a positive and significant effect on community welfare. Overall, transparency in village fund management and accountability simultaneously have a significant effect on community welfare.

Keywords: *Transparency in Village Fund Management, Public Accountability, Welfare.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam masyarakat hukum yang telah eksis sejak lama dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan masyarakat di Indonesia. Peran desa sangatlah penting dalam tatanan kehidupan bangsa ini. Dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejak 15 Januari 2014, muncul harapan baru, bukan hanya bagi masyarakat desa, tetapi juga bagi pemerintah desa. Undang-Undang ini mengakui keberadaan masyarakat desa sebagai bagian penting dari keseluruhan masyarakat hukum, serta memperkuat posisi desa sebagai entitas yang diakui oleh negara.

Salah satu bukti Pemerintah mendukung pembangunan desa adalah melalui pencairan Dana Desa, yang berfungsi menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72, Dana Desa ditetapkan sebagai pendapatan yang bersumber dari APBN. Diharapkan, Dana Desa dapat membuka akses yang lebih luas bagi desa terhadap Kesejahteraan, sehingga mendukung perkembangan mereka menuju kemandirian dan kemajuan. Selain itu, program ini bertujuan untuk menjembatani ketimpangan pembangunan desa serta peningkatan peran masyarakat desa

sebagai pihak utama dalam proses pembangunan.

Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Data yang diperoleh dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2023 mengenai Prosedur Pembagian Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah tabel yang memperlihatkan rincian Dana Desa yang diterima di setiap desa Kecamatan Tenggulun.

Tabel 1 Jumlah Anggaran Dana Desa yang Diterima Setiap Desa di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang untuk Tahun Anggaran 2023

No.	Nama Desa	Anggaran Dana Desa
1	Selamat	Rp 1.513.543.519
2	Tenggulun	Rp 2.376.686.519
3	Rimba Sawang	Rp 1.204.317.519
4	Tebing Tinggi	Rp 989.088.519
5	Simpang Kiri	Rp 1.385.518.519
6	Sumber Makmur	Rp 312.667.519

Sumber : Peraturan Bupati Aceh Tamiang No. 1 Tahun 2023

Fenomena yang muncul terkait Dana yang diterima oleh masing-masing desa di Kecamatan Tenggulun merupakan jumlah yang tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, menunjukkan bahwa dana tersebut masih belum memadai untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data dari Kabar Tamiang (BPS) (2023), Kecamatan Tenggulun tercatat sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Kabupaten Aceh Tamiang, dengan total 18.956 penduduk miskin. Hal ini jelas mencerminkan adanya kesenjangan dalam kebijakan pengelolaan anggaran yang diberikan dengan keadaan masyarakat di Kecamatan Tenggulun.

Berdasarkan hasil observasi awal Kecamatan Tenggulun, yaitu Desa Selamat yang menerima dana sebesar Rp. 1.513.543.519 oleh pemerintah pusat namun tidak ada rincian pengeluaran dana desa yang diberitahukan secara transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui dana desa digunakan untuk apa saja. Seharusnya ada papan informasi maupun dalam bentuk banner yang dipasang di depan kantor Desa yang berisi informasi mengenai program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa dapat disebarluaskan. Dengan demikian, seluruh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan dana desa dapat mengetahui kegiatan tersebut.

Hasil observasi sejalan juga peneliti dapatkan di Desa Simpang Kiri yang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp 1.385.518.519 namun tidak terlihat adanya banner atau spanduk yang berisikan informasi mengenai penggunaan dana Desa, hal ini menandakan adanya ketidaktransparasian antara pemerintah Desa dengan masyarakat.

Transparansi merupakan dasar penting dalam pengelolaan Dana Desa, yang seharusnya diterapkan di semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa Rukmana (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 juga menekankan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi keuangan dengan akurat dan terbuka, sehingga mereka dapat memahami secara utuh pengelolaan sumber daya yang telah diamanahkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2020), bahwa transparansi dana desa memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat dimana Pengelolaan Dana Desa yang transparan dapat diawasi langsung oleh masyarakat akan menekan terjadinya penyelewengan sehingga dana Desa dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat krusial dalam pelaksanaan tata kelola yang baik dalam mengelola Dana Desa. Untuk mencapai akuntabilitas publik tersebut, pemerintah Desa melakukan langkah konkret dengan memberikan informasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diakui secara luas Gulo (2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Laila (2021) bahwa akuntabilitas publik sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dana Desa yang dikelola secara akurat dengan pencatatan yang sesuai peraturan yang berlaku menciptakan keterbukaan dan pengelolaan keuangan dari Dana Desa menjadi lebih terarah sehingga menciptakan kesejahteraan di masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan tingkat hidup yang dapat diukur melalui standar kehidupan yang ada. Kondisi ini dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perumahan yang layak, cukupnya kebutuhan pakaian dan makanan, serta akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Dalam keadaan ideal, Setiap individu dapat memaksimalkan manfaat sesuai dengan anggaran yang tersedia, sambil memenuhi kebutuhan fisik dan mental mereka. Demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang sejahtera yaitu masyarakat yang mampu menjalani kehidupan dalam keadaan yang memadai (Rulloh, 2018).

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan studi dengan judul “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang)”

Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

Teori Good Governance

Menuurut UNDP yang dikutip dalam Mahmudi (2019) bahwa Good Governance merupakan cara dari negara dalam mengelolaa sumber daya manusia baik dari aspek ekonomi maupun aspek sosial agar terciptanya pemerintahan yang baik dan mampu mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Good governaance diartikan sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dimana pemerintahan yang baik akan tercipta Ketika nsur negara, masyarakat, dan private bersinergi dan saling mendukung

Menurut Arifin (2020), terdapat paradigma baru dalam manajemen pembangunan dikarenakan pengertian Good Governance yang masih simpang siur. Pada umumnya Good Governance diartikan dengan pemerintahan yang bersih dan baik, sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance mengatakan bahwa Good Governance adalah pemerintahan yang berwibawa dan bersih. Dengan hal ini maka Profesor Bintoro Tjokroamidjojo mengajukan suatu gagasan tentang Good Governance sebagai paradigma baru administrasi/manajemen pembangunan yang ditempatkan dalam pemerintahan pusat. Pemerintah dapat menjadi penggerak perubahan komunitas di negara berkembang, dengan adanya Agent of Change (agen perubahan) maka sangat diharapkan untuk melaksanakan perubahan yang dikehendaki. Kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah yaitu industri- industri, proyek-proyek, serta peran perencanaan dan anggaran yang dapat mendorong investasi sektor swasta dengan persetujuan investasi dalam pemerintahan (Agustinus, 2019)

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merujuk pada keadaan yang menggambarkan kualitas hidup, yang tercermin dari standar hidup yang dijalani oleh masyarakat tersebut ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, yang dapat diamati dari adanya perumahan yang layak, akses yang memadai terhadap pakaian dan makanan, serta pendidikan dan layanan kesehatan yang dapat dijangkau dalam keadaan yang ideal, setiap individu seharusnya dapat mengoptimalkan potensi diri dalam batas anggaran yang ada, sekaligus memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat dianggap sejahtera (Rulloh, 2018).

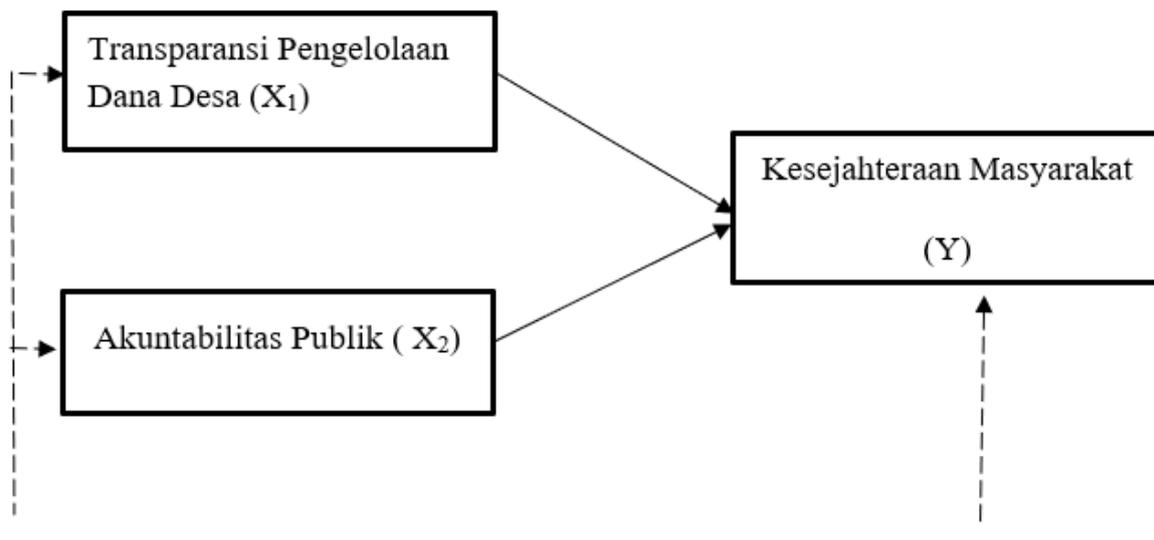
Teori Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Transparansi, berasal dari kata "transparency," mengacu pada prinsip keterbukaan kepada publik, serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, akurat, dan tidak mendiskriminasi terkait pengelolaan organisasi. Pada saat yang sama, prinsip ini tetap menghormati hak dasar individu, kelompok, dan menjaga kerahasiaan negara (Ardiyanti, 2019). Hadi (2019) menekankan bahwa transparansi adalah fondasi yang sangat menentukan pengelolaan dana desa, hal yang perlu diterapkan pada setiap proses perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, pengelolaan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut

Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang berhak serta memiliki kewajiban untuk meminta informasi tersebut (Kuswanti, 2020). Menurut Ardiyanti (2019), pertanggungjawaban akuntabilitas publik merupakan upaya menjelaskan atau menjawab tindakan seorang pemimpin, baik itu di tingkat kantor maupun perkumpulan, kepada Pihak yang berwenang. Nafidah dan Suryaningtyas (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas publik juga mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga transparansi dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dalam melaksanakan pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks otonomi daerah wilayah, guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini dilakukan melalui pertanggungjawaban dengan cara yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas

Berdasarkan uraian landasan teori di atas dalam tinjauan pustaka yang telah diuraikan sebelumnya, maka gambaran skematis mengenai hubungan antar variabel dapat dilihat pada gambar berikut



Gambar 1
Kerangka Berpikir
Hipotesis:

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Putri et al. (2021) Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik, di mana masyarakat dapat dengan mudah melihat informasi dari pemerintah saat membutuhkannya. Prinsip keterbukaan ini sangat penting, karena dapat memastikan bahwa keuangan Desa memenuhi hak masyarakat dan mengurangi potensi konflik dalam komunitas. Hal ini dilakukan dengan transparansi, pengelolaan dana desa dapat diawasi secara efisien oleh pihak yang berwenang. pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hal ini memungkinkan pemanfaatan penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efisien dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan

Transparansi pengelolaan dana desa adalah kunci utama dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance di tingkat desa. Keterbukaan informasi ini menjadi pondasi bagi pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip good governance. Tanpa transparansi, tujuan dari dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai karena berpotensi terjadi penyalahgunaan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat dan hilangnya kepercayaan pada pemerintah desa

Hasil dari penelitian oleh Nathania (2021) Menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Rahma (2021) Juga menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Syafa, (2022) Penelitian mengenai akuntabilitas publik pengelolaan dana menunjukkan pentingnya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat kampung atau desa menyatakan bahwa tingkat akuntabilitas publik serta pengelolaan dana tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dikategorikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan secara teknis kegiatannya.

Hal tersebut tampak pada penggunaan dana desa yang diperuntukan pada pada berbagai kegiatan oleh kepala desa baik secara pemerintahan maupun penyelenggaraan operasional desa. Begitu pula kebijakan desa yang memiliki pengaruh positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat, ini terlihat pada semua kebijakan desa yang dikeluarkan mampu dirasakan oleh masyarakat dapat pula meningkatkan pembangunan di desa, meningkatnya pemberdayaan masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini didukung pula terjadinya peningkatan perbaikan-perbaikan jalan poros desa, adanya pembangunan drainase atau saluran air hal tersebut dapat secara langsung dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

Akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana desa berhubungan erat dan saling mendukung dengan prinsip-prinsip good governance. Penerapan akuntabilitas menjadi kunci utama untuk mencapai tata kelola pemerintahan desa yang baik, transparan, dan partisipatif. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah atasan. Hal ini mencakup pelaporan yang jelas, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan

yang berlaku. Sementara itu, good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efisien, dan efektif, dengan menjaga sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan salah satu prinsip pengimplementasian dari good governance yang dimana akuntabilitas sendiri sangat krusial karena dana desa merupakan amanah dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Tanpa akuntabilitas, risiko penyalahgunaan dana menjadi tinggi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa akan menurun.

Sejalan penelitian yang di lakukan oleh Kuswanti (2020) akuntabilitas pengelolaan dana kampung atau desa berpengaruh positif pada kesejahteraan masyarakat memulai perencanaan dana desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah, dalam pelaksanaannya masyarakat dapat memantau langsung apakah pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, laporan realisasi untuk satu periode atau satu tahun di buat kan spanduk yang dapat dilihat oleh siapapun serta masyarakat dapat merasakan hasilnya secara langsung dari kegiatan penggunaan dana desa di desa nya. Demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas Publik Pengelolaan Dana Desa Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Transparansi dan Akuntabilitas Publik diperlukan agar suatu pemerintahan dianggap baik dengan adanya ketiga prinsip tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengetahui bagaimana keadaan sebuah lembaga pemerintahan. Dengan adanya prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nela Sari dan Wahidahwati (2020) yang berjudul Pengaruh Penggunaan Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui bahwa penggunaan dana desa, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara bersamaan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kesejahteraan masyarakat. Keduanya merupakan pilar utama dalam penerapan prinsip good governance, yang secara langsung memengaruhi efektivitas penggunaan dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup di desa. Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) menjadi kerangka kerja yang menghubungkan transparansi dan akuntabilitas dengan kesejahteraan masyarakat. Tanpa good governance, dana desa berisiko disalahgunakan atau tidak tepat sasaran. Prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum, memastikan bahwa setiap proses pengelolaan dana desa dijalankan secara benar dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, good governance adalah jembatan yang mengubah komitmen transparansi dan akuntabilitas menjadi hasil nyata, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H3: Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Akuntabilitas Publik Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

METODOLOGI

Ruang lingkup penelitian mencakup berbagai aspek penting serta berkaitan dengan dampak Transparansi dalam pengelolaan dana desa dan akuntabilitas publik berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenggulun, yaitu: Transparansi Pengelolaan Dana Desa, fokus pada sejauh mana informasi mengenai penggunaan dana desa dapat diakses oleh masyarakat, meliputi proses pelaksanaan,

perencanaan, dan pelaporan dana desa yang terbuka. Akuntabilitas Publik, melihat bagaimana pemerintah desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa, baik melalui laporan yang jelas maupun mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat. Kesejahteraan Masyarakat, mengukur dampak pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur.

Wilayah Penelitian Penelitian ini dibatasi pada Kecamatan Tenggulun sebagai lokasi studi kasus untuk menilai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Sumber data menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber pengambilan data (Sugiyono, 2019). Sumber data dalam penelitian ini, informasi yang diperoleh berasal dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat desa di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti terdiri dari 6 desa di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 18.956

Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus benar-benar representatif (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi (Anshori, 2020). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik acak sederhana (simple random sampling) dimana dalam pemilihan sampel tersebut dilakukan secara acak. Jumlah sampel seluruhnya 100 dengan alokasi proporsional masing-masing desa dimana Desa Selamat 29 responden, Tenggulun 23 responden, Rimbang Sawang 9 responden, Tebing Tinggi 6 responden, simpag kiri 11 dan sumber makmur 22 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistic deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat Gambaran data secara umum seperti nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (max), nilai terendah (min) dan standar dari masing-masing variabel yaitu transparansi pengelolaan dana desa (X_1), akuntabilitas publik (X_2) terhadap kesejahteraan (Y). Berikut ini adalah hasil uji statistic deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
x1	100	29	42	36.30	2.823
x2	100	29	42	36.13	2.898
y	100	38	63	53.43	5.213
Valid N (listwise)	100				

Sumber : : Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas, dapat dijelaskan distribusi data yang diperoleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk variabel pengelolaan dana desa (X_1) didapatkan nilai minimum 29 sedangkan nilai maksimum yang didapat adalah 42 dan rata-rata pengelolaan dana desa adalah

36,30 serta standar deviasi yang dihasilkan adalah 2.823 menunjukkan bahwa tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-rata tergolong rendah, yang berarti bahwa tanggapan responden relatif homogen.

2. Untuk variabel akuntabilitas public (X_2) didapatkan nilai minimum 29 sedangkan nilai maksimum yang didapat adalah 42 dan rata-rata akuntabilitas publik adalah 36,13 serta standar deviasi yang dihasilkan adalah 2.898 mengindikasikan adanya variasi tanggapan responden yang masih tergolong rendah, menunjukkan konsistensi dalam penilaian mereka terhadap aspek akuntabilitas publik.
3. Untuk variabel kesejahteraan (Y) didapatkan nilai minimum 38 sedangkan nilai maksimum yang didapat adalah 63 dan rata-rata kesejahteraan adalah 53.43 serta standar deviasi yang dihasilkan adalah 5.213 menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai kesejahteraan masyarakat memiliki tingkat penyebaran yang sedang, mengindikasikan adanya variasi tanggapan yang lebih beragam dibandingkan variabel lainnya.

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametric Kolmogorof-Sminov (K-S). Jika signifikasi pada nilai *Kolmogrof Smirnov Z* < 0.05, maka H_0 ditolak, jadi data residual berdistribusi tidak normal. Jika signifikasi pada nilai *Kolmogrof Smirnov Z* > 0.05, maka H_0 diterima, jadi data residual berdistribusi normal.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.59559839
Most Extreme Differences	Absolute	.166
	Positive	.101
	Negative	-.166
Test Statistic		.166
Asymp. Sig. (2-tailed)		.712

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

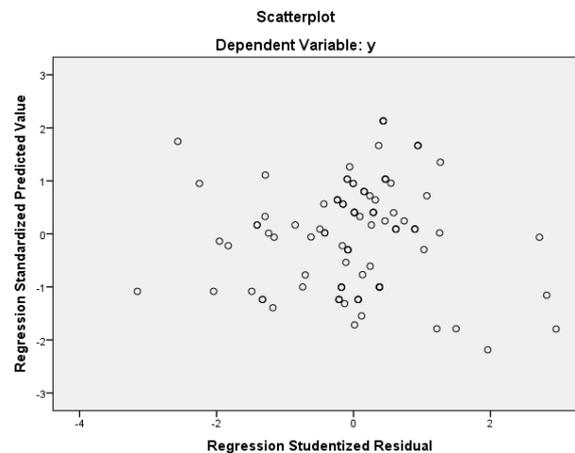
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan Tabel hasil uji Output diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,712 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh data baik dari transparansi pengelolaan dana desa, akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat seluruhnya dinyatakan normal.

Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik pada pengujian heterokedastisitas adalah tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *scatterplot*. Jika terlihat titik-titik pada grafik membentuk pola tertentu variabel independen tidak signifikan secara statistik dan tidak memengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar:



Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan gambar terlihat titik-titik pada grafik plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi yang digunakan

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel bebas dalam penelitian ini. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada nilai *tolerance* dan VIF. Apabila nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Adapun hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	x1	.364	.212	.150	.902	1.108
	x2	.708	.672	.626	.902	1.108

a. Dependent Variable: y

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan tabel diketahui bahwa nilai Tolerance variabel transparansi pengelolaan dana desa (X₁) sebesar 0,902 lebih besar dari 0,1 sementara nilai VIF 1,108 lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Nilai Tolerance variabel akuntabilitas publik (X₂) sebesar 0,902 lebih besar dari 0,1 sementara nilai VIF 1,108 lebih kecil dari 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi zakat, literasi keuangan, budaya dan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner yang hasilnya dilakukan analisis dengan regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel. 5 Hasil Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.011	5.720		.002	.999
	x1	.292	.136	.158	2.141	.035
	x2	1.186	.133	.659	8.939	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Hasil regresi linear berganda yaitu $Y = 0,011 + 0,292 X_1 + 1,186 X_2$ maka regresi linear berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 0,011 artinya jika X_1 (transparansi pengelolaan dana desa), dan X_2 (akuntabilitas publik) maka Y (kesejahteraan) bernilai tetap. Artinya jika transparansi pengelolaan dana desa meningkat, akuntabilitas publik meningkat maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Variabel transparansi pengelolaan dana desa (X_1) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,035 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,292. Hal ini menunjukkan jika transparansi pengelolaan dana desa mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka variabel kesejahteraan akan naik sebesar 29,2% dengan asumsi variabel akuntabilitas tetap. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.
3. Variabel transparansi akuntabilitas publik (X_2) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,186. Hal ini menunjukkan jika akuntabilitas publik mengalami kenaikan sebesar satu-satuan maka variabel kesejahteraan akan naik sebesar 118,6% dengan asumsi variabel pengelolaan dana desa tetap. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen.

Uji t

Pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh secara parsial transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas publik terhadap kesejahteraan dapat dilihat dari hasil uji t. Kriteria pengujiannya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan atau jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$) maka model regresi signifikan secara statistik dan dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 6 Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.011	5.720		.002	.999

x1	.292	.136	.158	2.141	.035
x2	1.186	.133	.659	8.939	.000

a. Dependent Variable: y

Sumber: Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan tabel hasil pengujian uji t di atas maka dapat diketahui sebagai berikut:

1. Berdasarkan tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa variabel transparansi pengelolaan dana desa memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.141 > dari t_{tabel} 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar $0,035 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat
2. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik memiliki nilai t_{hitung} sebesar 8.939 > dari t_{tabel} 1,660 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji F

Untuk menganalisis hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat nilai F yakni nilai probabilitasnya, berpengaruh signifikan jika nilai probabilitas yang dihitung $< 0,05$ (signifikansi yang ditetapkan).

Tabel 7 Hasil Analisis Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1410.606	2	705.303	53.453	.000 ^b
	Residual	1279.904	97	13.195		
	Total	2690.510	99			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Berdasarkan tabel pengujian hipotesis untuk mengetahui secara simultan (keseluruhan) transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari uji F, dimana nilai F_{hitung} sebesar 53.453 > F_{tabel} 3,09 dengan nilai signifikansi = 0,000. Dengan demikian nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis diterima yang artinya transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Besarnya koefisien determinasi berkisar antara angka 0 sampai dengan 1, besar koefisien determinasi mendekati angka 1, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 8 Hasil Analisis Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.514	3.632

a. Predictors: (Constant), x2, x1

Sumber : Hasil Penelitian, data diolah (2025)

Dari tabel terlihat bahwa nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,514 atau 51,4%, yang menunjukkan keterangan transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan variasi yang terjadi pada kesejahteraan sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Pembahasan

Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel transparansi pengelolaan dana desa sebesar $0,035 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan jika dalam pengelolaan Dana Desa dilakukan semakin transparan tanpa ada hal yang disembunyikan dari masyarakat maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dikarenakan masyarakat akan mengetahui secara jelas dana Desa yang ada dipergunakan untuk Pembangunan apa saja demi kemajuan Desa dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori dari Mahmudi (2019) tentang *good governance* bahwa dalam membangun sebuah daerah harus dilakukan secara transparan untuk menentukan tujuan pemerintah, penilaian kinerja dan pencapaian disebut juga sebagai tata cara kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Pada hasil pengujian regresi linear berganda variabel transparansi pengelolaan dana Desa terhadap kesejahteraan mendapatkan hasil nilai koefisien regresi menunjukkan arah yang sejalan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang dilakukan oleh para aparat desa maka juga akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa. Jika aparatur telah melakukan sistem transparansi yang baik kepada setiap masyarakat, maka masyarakat tentunya dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap keuangan dana desa. Masyarakat juga dapat mengetahui dana desa digunakan untuk apa saja oleh aparat desa, sehingga kecurangan pada dana desa dapat diminimalisir. Oleh karena itu semakin baik transparansi yang dilakukan oleh aparat desa, maka akan meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat desa. Transparansi yang baik juga akan membuat dana desa dapat dimanfaatkan dengan benar tanpa ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Bentuk dari transparansi ini seperti pemberian informasi terkait dengan dana desa melalui media internet maupun penyampaian langsung terhadap masyarakat serta melalui papan pengumuman.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sudah cukup baik terlihat dari pengelolaan dana desa yang transparan dan telah dipublikasikan di situs BPS sehingga masyarakat dapat melihat secara langsung, adanya papan informasi anggaran dan proyek, adanya musyawarah desa yang terbuka sebelum melakukan pembangunan di Desa, kemudian ada juga laporan pertanggung jawaban dimana selain laporan formal yang ditujukan ke pemerintah daerah, Desa juga membuat laporan pertanggungjawaban yang ringkas dan mudah dipahami oleh masyarakat awam. Laporan ini dapat berupa infografis atau poster yang menjelaskan secara visual penggunaan dana desa dan hasil-hasil yang telah dicapai. Laporan ini bisa ditempel di tempat-tempat strategis atau dibagikan saat acara-acara desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2023) menyatakan transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian sejalan juga dilakukan oleh Heavenly dkk, (2024) dimana transparansi dalam penegelolaan Dana Desa memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan bahwa adanya transparansi yang baik memungkinkan untuk meminimalisir tingkat penyelewengan atau tindakan korupsi pada dana Desa. Sehingga ketika pengelolaan keuangan dana Desa dilakukan secara baik dan sesuai dengan tujuan serta kepentingan masyarakat yang ada di desa maka tingkat kesejahteraan akan menjadi tinggi dan sebaliknya apabila terdapat indikasi pengelolaan dana desa yang buruk maka kesejahteraan masyarakat dapat menurun dikarenakan tidak tercapainya tujuan dari dana Desa tersebut.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel akuntabilitas publik sebesar $0,000 < 0,05$ maka hipotesis diterima. Artinya akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan semakin terbukanya laporan-laporan mengenai dana Desa maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori dari Arifin (2020) mengenai *good governance* bahwa pembangunan di sebuah daerah dapat berjalan dengan sempurna apabila pemerintahan yang dijalankan yang bersih dan baik serta terdapat pencatatan yang jelas mengenai seluruh aktivitas yang dilakukan.

Akuntabilitas mempunyai hubungan yang kuat dengan kesejahteraan masyarakat, karena akuntabilitas memiliki arti pertanggungjawaban baik kinerja maupun laporan keuangan kepada masyarakat. Pelaksanaan akuntabilitas di Kecamatan Tenggulun sudah sangat baik. Salah satu cara yang dilakukan dalam pelaksanaan akuntabilitas dengan cara memasang spanduk yang berisi pertanggungjawaban keuangan desa beserta foto kegiatan yang sudah telaksana. Meskipun belum semua Desa membuat spanduk rencana pengelolaan dana Desa, namun masyarakat yang membutuhkan data-data secara langsung penggunaan dana Desa dapat memintanya langsung kepada para perangkat Desa yang ada di Kecamatan Tenggulun.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang sudah cukup baik terlihat dari adanya laporan pertanggung jawaban secara resmi dan berkala yang diberikan kepada BPKD (badan Pengawas Keuangan Daerah) dan sekarang setiap Desa diwajibkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mencatat semua transaksi keuangan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem ini akan menghasilkan laporan yang standar dan terstruktur. Penggunaan sistem ini meminimalkan kesalahan pencatatan manual, memudahkan audit, dan menjadi bukti bahwa akuntabilitas telah diterapkan secara maksimal

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menerangkan keberhasilan kinerja dan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban kepada seseorang atau badan yang berwenang. Akuntabilitas juga digunakan usaha pemerintah untuk mewujudkan rencana rancangan pemerintah untuk menjadi yang lebih baik dengan berdasarkan *good governance*. Sehingga diharapkan mampu menjalankan keserasian integritas produktif yang bermanfaat diantaranya dengan partisipasi masyarakat, wilayah, dan bagian swasta. Maka akuntabilitas diharapkan mampu menyempurnakan status juga kinerja dari perangkat pemerintah agar menjadi kedaulatan pemerintah yang terbuka dan fokus terhadap kebutuhan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Fanda (2024) menjelaskan bahwa Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa sudah digunakan dengan tepat sehingga mampu mengakomodasikan pembiayaan terkait program pemberdayaan rakyat yang akan berpengaruh baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yupita

(2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap aparat Desa memiliki kewajiban yang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak-pihak terkait yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jadi akuntabilitas publik sangat dibutuhkan bagi kemajuan Desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Jika dana Desa dapat dikelola dengan baik dengan pencatatan yang jelas, program-program yang jelas dan tepat sasaran maka dengan demikian seluruh masyarakat akan menerima manfaat dari dana Desa tersebut sehingga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa-Desa yang terletak di Kecamatan Tenggulun Kabupaten Aceh Tamiang

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis untuk mengetahui secara simultan (keseluruhan) pengaruh transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas desa terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat dari uji F, dimana nilai signifikansi = 0,000. Dengan demikian nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis diterima yang artinya transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika pengelolaan dana Desa yang ada di Kecamatan Tenggulun dilakukan secara transparan dan jelas pencatatannya serta dapat diketahui oleh seluruh masyarakat menandakan bahwa dana Desa telah dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Tenggulun.

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi didapatkan nilai Adjusted R Square yang diperoleh sebesar 0,514 atau 51,4%, yang menunjukkan keterangan transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas publik dalam menyelesaikan variasi yang terjadi pada kesejahteraan sebesar 51,4%, sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenggulun merupakan suatu Kondisi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tenggulun dapat dilihat dari indikator penting yang mencerminkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan keadilan demokrasi. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila mereka memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, layanan publik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta distribusi sumber daya yang merata. Ketiga bentuk keadilan tersebut merupakan manifestasi dari prinsip equity dalam teori *Good Governance*. Pendapat ini juga diperkuat oleh Sutedi (2012), yang menyatakan bahwa "Tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* akan terwujud apabila proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif, sehingga hasilnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Laila (2021) bahwa Dana Desa, Akuntabilitas, dan Transparansi pengelolaan dana desa secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari pengelola dana desa yang bertanggung jawab sehingga anggaran terkelola dengan baik yang akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam mengelola dana desa baik itu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan dilakukan secara terbuka tanpa adanya ketertutupan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaruh transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Transparansi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan atau tindakan korupsi. Di sisi lain, akuntabilitas mendorong pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran yang dilakukan. Ketika kedua aspek tersebut berjalan dengan baik dan saling mendukung, maka pengelolaan dana desa akan lebih efektif, tepat sasaran, dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian baik pengujian secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel transparansi pengelolaan dana desa dan akuntabilitas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan dalam penelitian ini dimana objek penelitian hanya di Kecamatan Tenggulun yang merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Aceh Tamiang, diharapkan nantinya penelitian selanjutnya dapat meneliti seluruh Kecamatan yang ada di Aceh Tamiang agar mampu mendapatkan hasil yang lebih konkret dan mengetahui yang sebenarnya apakah seluruh masyarakat Aceh Tamiang sudah merasakan kesejahteraan dari pengelolaan dana Desa.

Diharapkan bagi Desa yang belum membuat baliho mengenai pengeluaran dana Desa diharapkan dapat segera dibuat agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai pengelolaan dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, R. (2019). pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Arikunto, Suharsimi. (2017). Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR
- Ansori, M. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif Edisi 2. Airlangga University Press.
- Ayu Nela Sari, W. (2020). Pengaruh Penggunaan Dana Desa, Akuntabilitas publik dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1-15.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54.
- Ade Ayu Anggreni Putri, I. W. S., & Samtika, I. P. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas publik, Trasnparansi, Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengelonaan Dana Desa pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Arifin, Z. (2020). Metodologi Penelitian Pendidikan *Education Research Methodology*. STIT Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, 1(1), 1–3.
- Agustinus Herimulyanto. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Dewi, F. G. R., & Sapari. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dana Desa, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–20.
- Emylia, L. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kebijakan desa, kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(6).
- Fahrudin. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Ghozali, I. (2018). *Alokasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Universitas Diponegoro.

- Gulo, K. E., & Kakisina, S. M. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. 2(1), 39–43.
- Hadi, Rifa Rizka. 2019. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang).” Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Haryanto, R., & Fitri, M. (2019). Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19. *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 133-146.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Heavenly Kenneth Nistel Polii., Lawren Julio Rumokoy., Imelda W.J Ogi (2024). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat Minahasa. *Jurnal EMBAVol. 12 No. 03 September 2024*, Hal. 1607-1617
- Kuswanti, Afida Putri Eka. 2020. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD), Kebijakan Desa, Dan Partisipasi Masyarakat (Studi Empiris Pada Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wiringinanom Kabupaten Gresik).” Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya.
- Kaloh, J. (2010). *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Kusuma Wardani, D., & Ranika Putri Utami, R. (2020). Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidoharjo. *Jurnal Kajian Bisnis*, 35–50.
- Kusuma (2023) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dana Desa, Kebijakan Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat urnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 12, Nomor 7, Juli 2023
- Laila, H. (2021). Pengaruh Penggunaan Dana Desa, Akuntabilitas publik, Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Nagari Pasilihan. *Skripsi*, 4-131.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Munshi, J. (2014). A Mehtod for Constructing Likert Scales. <http://ssrn.com/abstract=2419366>
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit STIM YPKN.
- Nafidah, Lina Nasihatun., dan Mawar Suryaningtyas. 2015. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 3(1):214-239.
- Naimah. (2017). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.” Tesis Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Nathania, B., & Siringo-ring0, E. D. M. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 3(1), hal.8-12.
- Putri, A. A. A., Sudiana, I. W., & Putra, I. P. D. S. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, April, 699–730.
- Prandara, R. 2020. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Finansial Masyarakat. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung
- Rulloh, N. (2018). Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Lumbok Resort Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Rahmah, N. A., Pratiwi, L., & Rismayani, G. (2021). ”Analisis pengelolaan dana desa dan prioritas penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa sindangkasih di era pandemi covid-19.” *Jurnal ekonomi perjuangan*, 3(2), 55-67.
- Rukmana, H., & Utami, W. B. (2023). Pengaruh Penggunaan Dana Desa, Akuntabilitas dan

- Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Majasto Kecamatan Tawang Sari. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis (JIKAB)*, 2(2), 307-316.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik" Bagian Pertama Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2010. "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Mustafa, Delly. 2014 " Birokrasi pemerintahan". Afberta Bandung Ayanti. 2010. "Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemimpinan Yang Baik". Bandung: PT. Refika Aditama
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik"*. Bagian Kedua Edisi Revisi. Bandung: CV. Mandar Maju
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, . 2019. "Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D." Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono, (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sutedi. 2012. *Good Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafa Nesa Ardelia (2022) Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* : Volume 11, Nomor 4, April 2022
- Utami dan Fanda (2024) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen. *Riset Ilmu Manajemen Bisnis dan Akuntansi* Volume. 2 No. 3 Agustus 2024 e ISSN: 2988-6880; p-ISSN: 2988-7941, Hal 299-327 DOI: <https://doi.org/10.61132/rimba.v2i3.1163>.
- Yupita, L., & Juita, V. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 56.